

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Usaha yang paling banyak di Indonesia adalah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). UMKM mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan menciptakan lapangan kerja, pendapatan, dan mengurangi pengangguran. Sebagai negara yang sedang berkembang, dinamika ekonomi regional Indonesia penting untuk dianalisis. Operasional UMKM berkaitan erat dengan metode akuntansi, yang berguna untuk mencerminkan tren keuangan serta memantau dan mengevaluasi kelangsungan usaha perusahaan (Andrianto, 2019).

Sumbangan UMKM pada ekonomi nasional sangat besar — data Kementerian Koperasi dan UKM (2018) mencatat bahwa terdapat sekitar 64,2 juta pelaku UMKM, atau hampir seluruh unit usaha di Indonesia. UMKM juga menyerap tenaga kerja dalam skala luas, sehingga menjadi pondasi kuat ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemerintah dan pelaku usaha perlu mendorong peningkatan skala usaha mikro ke tingkat menengah agar potensi ekonomi domestik bisa lebih optimal, mempercepat perputaran uang, dan memperkuat ketahanan terhadap guncangan ekonomi (Yulya Ammi Hapsari et al., 2024).

Meskipun jumlahnya besar dan berkembang pesat, banyak pemilik UMKM yang belum memahami konsep akuntansi dan penyusunan laporan keuangan secara memadai. Penelitian Rudiantoro dan Siregar (2012) menunjukkan bahwa praktik pencatatan pada UMKM umumnya terbatas pada catatan persediaan, utang/piutang, serta arus kas sederhana. Oleh sebab itu, peningkatan literasi akuntansi menjadi kebutuhan penting agar pengusaha UMKM dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai aturan dan berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang baik memungkinkan analisis kinerja, evaluasi posisi keuangan, dan pemetaan arus kas yang membantu perencanaan ekonomi (Putra & Kurniawati, 2012).

Menanggapi permintaan ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan SAK EMKM (yang kemudian berganti nama menjadi SAK Indonesia untuk EMKM), sebuah standar usaha kecil dan sederhana. Standar ini berlaku untuk UMKM sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, serta usaha yang tidak memiliki permintaan publik yang substansial. SAK EMKM meningkatkan proses audit UMKM melalui penilaian dan liabilitas berbasis biaya. Mulai 1 Januari 2024, DSAK IAI akan mengubah namanya dari EMKM menjadi SAK Indonesia.

Salah satu asumsi dasar dalam SAK EMKM adalah konsep entitas, sehingga pemisahan antara harta pribadi pemilik dan kekayaan usaha harus jelas agar laporan keuangan mencerminkan kondisi usaha yang sesungguhnya. Dengan persyaratan yang lebih ringkas dan realistis ini, UMKM seharusnya dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih terbuka dan bertanggung jawab daripada sebelumnya (Simanjuntak et al. 2020). Sebagai contoh nyata UMKM di sektor perdagangan, UD Manik & Co adalah toko bahan bangunan yang beroperasi di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Usaha ini menyediakan berbagai material konstruksi dan didirikan dengan tujuan mendukung kegiatan pembangunan daerah melalui penyediaan bahan yang mudah diakses. Meskipun telah lama berdiri, UD Manik & Co. belum menerapkan standar akuntansi formal untuk pelaporan keuangan. SAK EMKM sebaiknya diterapkan di organisasi-organisasi tersebut untuk menghasilkan pelaporan keuangan yang lebih akurat dan landasan yang kokoh bagi pengambilan keputusan.

Untuk memperluas usaha atau mendapatkan modal, UD Manik & Co perlu menjalin kerja sama dengan investor atau mengajukan kredit perbankan. Salah satu persyaratan penting dalam proses tersebut adalah ketersediaan laporan keuangan yang menunjukkan kinerja dan kelayakan usaha. Oleh sebab itu, penyusunan laporan

keuangan menurut SAK EMKM menjadi langkah strategis agar akses terhadap pendanaan formal menjadi lebih mudah.

Berdasarkan kriteria dan urgensi di atas, penelitian ini mengkaji penggunaan SAK EMKM dalam laporan keuangan UD Manik & Co. Penelitian ini memberikan saran praktis bagi perusahaan yang menyusun laporan keuangan sesuai standar dan data aktual SAK EMKM pada organisasi perdagangan skala UMKM. Penelitian ini dapat membantu pelaku UMKM memperkuat tata kelola keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui wawasan teoretis dan praktis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam penyusunan laporan keuangan di UD Manik & Co?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis dan mengetahui bagaimana proses penyusunan laporan keuangan UD Manik & Co yang sesuai dengan ketentuan SAK EMKM.

1.4. Kontribusi/Manfaat Tugas Akhir

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pada beberapa aspek berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan tambahan bukti empiris dalam kajian penerapan SAK EMKM pada UMKM di Indonesia, khususnya pada usaha dagang yang telah lama berjalan namun belum menerapkan standar akuntansi formal.

2. Secara Praktis

Menghasilkan keluaran yang berguna bagi praktik, antara lain format laporan keuangan yang disesuaikan untuk UD Manik & Co menurut SAK EMKM, template kerja di Microsoft Excel untuk pencatatan akuntansi terkomputerisasi, serta panduan prosedur pencatatan transaksi yang membantu meningkatkan pengelolaan keuangan, memperbaiki proses pengambilan keputusan, dan mempermudah akses ke sumber pembiayaan formal.

3. Bagi UD Manik & Co

Memberikan gambaran evaluatif terhadap praktik pencatatan dan pelaporan keuangan saat ini serta rekomendasi perbaikan sehingga manajemen dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan usaha.

4. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam penerapan standar akuntansi pada UMKM serta melatih kemampuan melakukan penelitian dan menyusun laporan ilmiah secara sistematis.